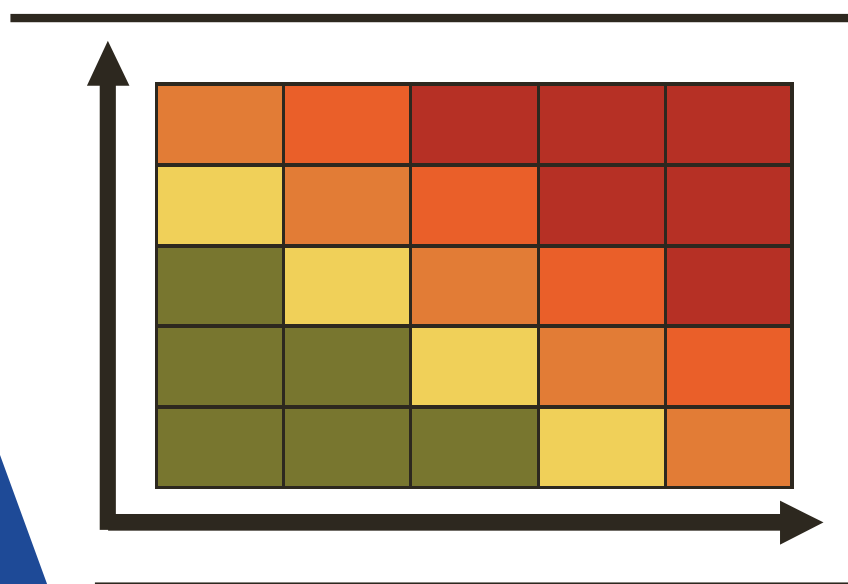




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atau disebut juga Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), yang juga merupakan perjalanan tahun pertama dari Renstra Tahun 2020-2024.

Penyusunan LKj ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2013 tentang Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran serta Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2020 menjelaskan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam dalam tahun 2020, tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2020, sekaligus merupakan laporan kinerja Badan Pengusahaan Batam yang merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

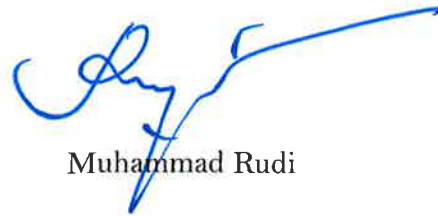
Dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2020 Badan Pengusahaan Batam ini kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, dan transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKj tahun 2020 ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Pengusahaan Batam di masa yang akan datang.

Kami menyadari dalam pembuatan dan/atau penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 ini masih terdapat kekurangan yang akan diperbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh unit kerja yang ada di Badan Pengusahaan Batam.

Batam, Februari 2021

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam



Muhammad Rudi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang telah direncanakan. Capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Beberapa capaian utama kinerja Badan Pengusahaan Batam pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Total
BP Batam memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1) Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif	Meningkatkan investasi pada sektor industri, jasa, hub logistik, dan pariwisata di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam	1.1 Investasi pada Kawasan Pengusahaan	1.1.1 Komitmen Investasi	\$ 1.500.000.000,00	\$ 21.491.950.058,00	358.20	428,51%
	1.1.2 Realisasi Investasi			\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.355.234.319,45	54.21		
	1.1.3 Program Dukungan Kegiatan Investasi			100%	46%	16.10		
	2) Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif		2.1 Kinerja Pendapatan	2.1.1 Realisasi Jumlah PNPB	Rp1.020.315.337.000,00	Rp1.020.315.337.000,00	128.15	128,15%
	3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam		3.1 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	3.1.1 Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik	≥ 81,00 (skala 1-100) Predikat Baik	84.10 (Predikat Baik)	103.83	103,83%
	4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam		4.1 Pengembangan Sistem Informasi BLU	4.1.1 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	83.00%	83.00	83,00%
	5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan		5.1 Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	5.1.1 Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	100%	80.00%	80.00	80,00%
6) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam	6.1 Inovasi Pelayanan	6.1.1 Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM, dan Lingkungan	3 Destinasi	57.50%	57.50	57,50%		
Rata-Rata								146,83%

Table 1 Alur –Visi Misi – Realisasi 2020

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja utama, dengan capaian sasaran sebesar 146,83%.

Kategori pencapaian sasaran tahun 2020 cukup sesuai dengan yang diharapkan, tetapi ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran, antara lain:

- a. Hambatan eksternal yang dominan dan sangat mempengaruhi capaian kinerja sesuai yang telah direncanakan, misalnya:
 1. Kurangnya sinkronisasi dalam penerapan aturan perijinan untuk KPBPB Batam.
 2. Masih kurang optimalnya koordinasi antarlembaga.
- b. Hambatan internal yang cukup mempengaruhi capaian kinerja adalah:
 1. Sebaran sumber daya manusia yang belum optimal.
 2. Inovasi IT yang belum optimal.

Berbagai permasalahan atau kendala tersebut diatas diusahakan untuk diatasi agar tidak menghambat pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan:

- a. Penyelesaian peraturan dan ketentuan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas BP Batam;
- b. Tata kelola kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam sebaran yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- c. Perlu adanya komitmen untuk pengelolaan pengaduan hingga tuntas;
- d. Optimalisasi pemanfaatan aset dan sarana lainnya agar dapat memperoleh sumber pendapatan baru;
- e. Perlunya inovasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan visi dan misi BP Batam;
- f. Perlunya pengembangan inovasi IT dalam rangka peningkatan pelayanan dan pelaporan.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan guna pencapaian sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan yang baik, namun demikian, kami tetap berupaya agar laporan ini dapat memenuhi tujuan penyusunannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam	2
C. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam.....	5
D. Tugas Pokok dan Fungsi	6
E. Struktur Organisasi.....	7
F. Organisasi Pembina dan Asistensi.....	8
G. Unit Usaha dan Kegiatan Utama	9
H. Sumber Daya Manusia.....	14
I. Lingkungan Strategis yang Bepengaruh.....	15
BAB II.....	16
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
A.1. Visi.....	17
A.2. Misi	17
A.3. Tujuan	19
A.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	19
A.5. Arah Kebijakan dan Strategi	20
A.6. Program	26
A.7. Rencana Kinerja	26
B. Perjanjian Kinerja	32
BAB III	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Pengukuran Kinerja: Capaian Indikator Kinerja Utama.....	33
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	33
C. Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV	43
PENUTUP.....	43
B. Kesimpulan	43
C. Saran	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BP Batam.....	8
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah SDM BP Batam	14
Tabel 1.2 Analisis SWOT.....	15
Tabel 2.1. Uraian Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja BP Batam	20
Tabel 2.2. Alur Visi-Misi BP Batam 2020	25
Tabel 2.3. Hubungan Kegiatan Terhadap IKU	29
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	32
Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran ke-1.....	34
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran ke-2	34
Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran Ke-3	35
Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran ke-4	36
Tabel 3.5. Indikator Kinerja Sasaran ke-5.....	37
Tabel 3.6. Indikator Kinerja Sasaran Ke-6	37
Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Utama 2020	39
Tabel 3.8. Realisasi PNBP 2020	40
Tabel 3.9. Realisasi PNBP 2019	40
Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 dan 2019.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pulau Batam merupakan salah satu pulau di antara 329 pulau dalam gugusan Kepulauan Riau, yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura. Langkanya catatan tertulis dari pulau ini, maka hanya ada satu literatur yang menyebutkan nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung.

Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.

Pada tahun 1970-an, Pulau Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau disingkat dengan Otorita Batam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 62 tersebut ditandatangani atau diberlakukan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Pulau Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur modern yang berstandar internasional, serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.

Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersedianya berbagai lapangan usaha, khususnya penanaman modal asing dari berbagai negara, yang mampu menampung tenaga kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin tumbuhnya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Namun, sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari

masalah. Untuk itulah, dilakukan penyempurnaan pengembangan Pulau Batam agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

B. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan institusi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program organisasi agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kinerja organisasi, serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu strategis juga merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka Badan Pengusahaan Batam akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Untuk mendukung instrumen kebijakan dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berdaya saing untuk meningkatkan nilai investasi adalah pengaturan dalam pelayanan, khususnya yang di bawah naungan pengelolaan BP Batam.

Beberapa aspirasi dari masyarakat (*stakeholders*) yang dianggap mampu menjadi daya ungkit Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yaitu

1. Pelayanan perijinan terpadu dalam satu tempat bernama Mall Pelayanan Publik sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan akurat;
2. Penerapan OSS (Online Single Submission) bagi kemudahan dalam investasi di KPBPB Batam.

3. BP Batam sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diharapkan segera mengoptimalkan fungsi kepelabuhanan untuk pemanfaatan kapasitas yang tersedia;
4. Kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung iklim investasi dan daya dukung kehidupan masyarakat;
5. Profesionalisme pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*stake holder*) yang berlandaskan atas prinsip efektif, efisien dan transparan.

Sedangkan beberapa isu strategis Badan Pengusahaan Batam yang perlu diatasi dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, antara lain

- 1) Peraturan Perundangan UU 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang belum dilengkapi dengan peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.

Hal-hal yang perlu dirumuskan dalam peraturan teknis antara lain adalah masalah pelimpahan wewenang perizinan, pembiayaan pembangunan, pembagian pendapatan, pertanahan, dll. Salah satu pelayanan yang diinginkan oleh calon investor dari pengelola kawasan adalah kemudahan dalam memperoleh berbagai izin yang disyaratkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang umumnya dalam bentuk pelayanan satu atap di dalam Mall Pelayanan Publik. Lama pengurusan dan biaya, serta prosedur permintaan izin-izin harus ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Pengembangan dan pengoperasian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam juga akan menyangkut kepentingan dan urusan tingkat daerah, seperti masalah tata ruang, penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana, dll. Untuk itu perlu dibuat beberapa peraturan daerah yang mengatur kerjasama kedua lembaga.

- 2) Pengembangan infrastruktur. Untuk menunjang kegiatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka infrastruktur harus dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan. Peningkatan infrastruktur juga melingkupi pengembangan sistem dan prosedur yang memberi kemudahan bagi investor menjalankan usahanya, seperti sistem kepabeanan, sistem keimigrasian,

sistem kepelabuhanan, sistem penerbangan, sistem perbankan, dll. Pembangunan infrastruktur dapat dibiayai oleh swasta, pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

- 3) Insentif. Insentif yang menarik diperlukan untuk mendatangkan investor. Adanya investasi asing diharapkan akan membuka lapangan kerja, meningkatkan penguasaan teknologi dan manajemen usaha, mendorong tumbuhnya industri pendukung, dan mendatangkan devisa dari kegiatan ekspor yang dilakukan.
- 4) Tata kelola. Untuk dapat bersaing dengan FTZ lain maka pengelolaan perlu dilakukan secara profesional dengan praktek manajemen standar internasional. Dalam kaitan ini, Badan Pengusahaan Batam dapat membangun suatu pola kerjasama yang sifatnya mutualistik dengan kawasan sejenis di ASEAN. Selain itu, perlu secara seksama memanfaatkan kerjasama ekonomi sub-regional yang telah dikembangkan selama ini, khususnya dalam konteks IMS-GT dan IMT-GT, dengan membuka kerjasama dan hubungan bisnis yang intensif dengan kawasan sejenis di berbagai negara.
- 5) Ketenagakerjaan. Investor yang beroperasi di Batam akan memerlukan tenaga terampil dalam jumlah banyak. Apalagi seiring dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di awal 2016, yang memungkinkan tenaga kerja asing mengisi posisi pada bidang-bidang tertentu, maka hal ini perlu diantisipasi. Pada saat ini tenaga terampil tersebut masih belum mencukupi. Untuk itu agar kekurangan tenaga terampil itu tidak diisi oleh pendatang dari luar Batam atau luar negeri, maka sejak dini generasi muda di Kawasan Batam perlu disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga terampil yang siap dipekerjakan. Pengusaha lokal juga perlu disiapkan untuk dapat menjadi penyalur bahan pangan dan industri bagi perusahaan industri pengolahan dari luar yang akan menjalankan usahanya di Kawasan Batam.
- 6) Kelembagaan. Perlu dilakukan pengaturan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, BP Batam dengan Pemko Batam agar pembangunan Kawasan Batam tidak mengalami berbagai kendala. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain masalah pertanahan, perizinan, pengelolaan, pembiayaan, tata ruang dan lingkungan, dll. Pola hubungan kerjasama antara Pemko Batam dengan BP Batam juga perlu dikaji secara mendalam, sehingga dapat terjadi suatu pola kemitraan yang sinergis antar kedua lembaga. Kejelasan terhadap kewenangan, khususnya antara kewenangan Pusat yang diemban oleh BP Batam dan kewenangan Pemko Batam, perlu ditetapkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dan konflik yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dan pengusahaan kawasan Batam di masa mendatang.

C. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun.

Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Wilayah kerja KPBPB ditambah dengan Pulau Janda Berhias dan gugusannya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kegiatan utama pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Penetapan Batam sebagai salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 tahun 2019 dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007, maka kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi ***Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*** atau disingkat dengan ***Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)***.

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dijalankan oleh BP Batam, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan/peraturan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 11 september 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Pemberhentian Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan sumber daya manusia kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
- b. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang kebijakan strategis;
- c. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan kawasan dan investasi;
- d. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengusahaan;

- e. Pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam;
- f. Pengelolaan lahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun; dan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Batam.

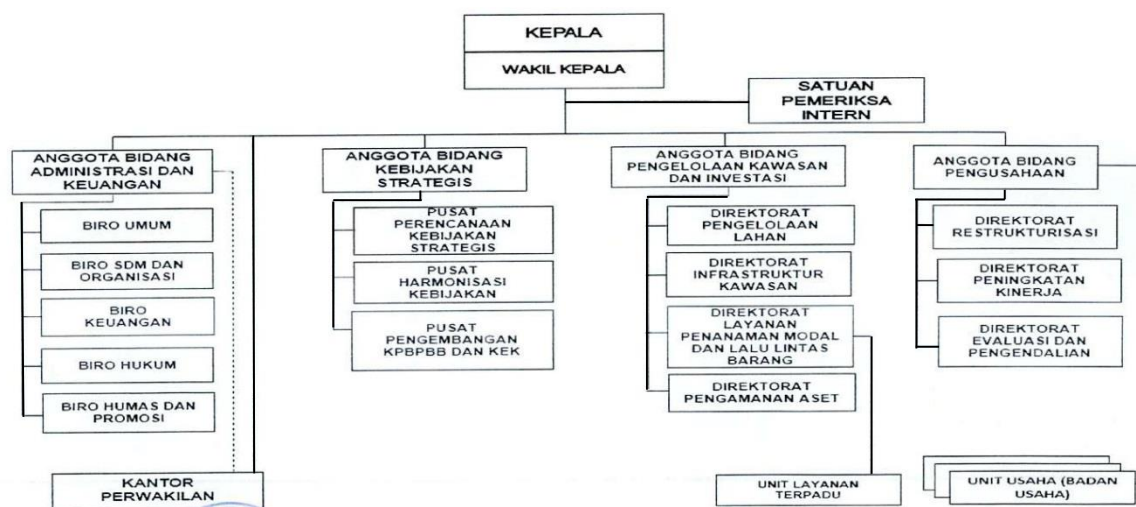
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Dewan Kawasan tersebut, Badan Pengusahaan Batam mempunyai kewenangan:

- a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- b. mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat peraturan di bidang tata tertib pelayanan dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan dan lain sebagainya serta penetapan tarif segala macam jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas dan wewenang lain, yang meliputi:
 - 1) pengelolaan, pembangunan, sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta melaksanakan percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga mampu bersaing dengan Kawasan sejenis di negara lain.
 - 2) kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor industri, maritim, perdagangan, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya;
 - 3) memproses Perizinan Usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam dan melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam.
- e. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk tugas-tugas dan wewenang Pemerintah Kota Batam, kecuali terhadap tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Dewan Kawasan menetapkan organisasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja, berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan

Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP Batam

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam dibantu oleh 4 anggota yang mempunyai tugas sesuai bidangnya, yaitu

1. Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan;
2. Anggota Bidang Kebijakan Strategis;
3. Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi;
4. Anggota Bidang Pengusahaan.

Sedangkan sebagai penjabaran dari peraturan dewan kawasan dimaksud Kepala Badan Pengusahaan Batam mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Kerja Di bawah Anggota Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Usaha Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

F. Organisasi Pembina dan Asistensi

Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 29 Februari 2016, penetapan kebijakan umum, pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan Badan Pengusahaan Batam dilakukan oleh Dewan Kawasan yang keanggotaannya terdiri dari:

- Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Gubernur Kepulauan Riau;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Walikota Batam.

Pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam tidak lepas dari peran Dewan Kawasan yang memberikan bimbingan dan arahan yang diberikan kepada BP Batam.

Dewan Kawasan mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam;
- c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Badan Pengusahaan Batam mengenai pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kawasan (DK) dapat membentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis. DK melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DK bertugas selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tersebut.

G. Unit Usaha dan Kegiatan Utama

Jumlah unit kerja sesuai struktur organisasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBBP) Batam adalah sebanyak 22 unit, terdiri dari:

- a. Unit Kerja yang menghasilkan PNBP dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung sebanyak 10 Unit Kerja, yaitu sebagai berikut:
1. Badan Usaha Pelabuhan, memiliki 5 jenis layanan yaitu:
 - 1) Pelayanan Keluar Masuk Kapal;
 - 2) Pelayanan Barang;
 - 3) Pelayanan Penumpang yang terdiri dari pas penumpang di terminal penumpang;
 - 4) Pelayanan Jasa Alat;
 - 5) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya.
 2. Kantor Pengelolaan Lahan, memiliki 8 jenis layanan meliputi:
 - 1) Pelayanan Ijin Alokasi Lahan;
 - 2) Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lahan;
 - 3) Pelayanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi (PL);
 - 4) Pelayanan Legalisasi Dokumen Lahan;
 - 5) Pelayanan Pecah dan Penggabungan Penetapan Lokasi;
 - 6) Pelayanan Ijin Peralihan Hak;
 - 7) Pelayanan Penggantian Dokumen;
 - 8) Pelayanan Perpanjangan UWTO.
 3. Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi, memiliki 9 jenis layanan diantaranya:
 - 1) Pelayanan Jasa Penerbangan;
 - 2) Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara;
 - 3) Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara;
 - 4) Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (*aviobridge*);
 - 5) Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (*Check in Counter*);
 - 6) Pelayanan Jasa Penumpukan Barang dalam Gudang Lini 1;
 - 7) Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Diluar Jam Operasi;
 - 8) Pelayanan Jasa Sewa dan Tanda Masuk Kawasan Terbatas Bandar Udara (*Pas*);
 - 9) Data Center;
 - 10) Training Center.
 4. Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam, yang terbagi dalam 21 jenis layanan meliputi:
 - 1) Pelayanan Gawat Darurat;

- 2) Pelayanan Rawat Jalan;
 - 3) Pelayanan Rawat Inap;
 - 4) Pelayanan Bedah Sentral;
 - 5) Pelayanan Persalinan Dan Perinatology;
 - 6) Pelayanan Intensif (Pi);
 - 7) Pelayanan Radiologi;
 - 8) Pelayanan Laboratorium;
 - 9) Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - 10) Pelayanan Farmasi;
 - 11) Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi;
 - 12) Pelayanan Gakin;
 - 13) Pelayanan Ambulance/Kereta Jenasah;
 - 14) Pelayanan Pemulasaran Jenasah;
 - 15) Pelayanan Gizi;
 - 16) Pelayanan Transfuse Darah;
 - 17) Pelayanan Rekam Medik;
 - 18) Pelayanan Pengelolaan Limbah;
 - 19) Pelayanan Administrasi Dan Manajemen;
 - 20) Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - 21) Pelayanan Laundry.
5. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, memiliki 16 jenis layanan meliputi:
- 1) Pelayanan Rekomendasi Sambungan Air Bersih;
 - 2) Pelayanan Jasa Pengurusan *Septic Tank* (Sumur Tinja);
 - 3) Pelayanan Jasa Pengolahan Limbah Domestik;
 - 4) Pelayanan Izin Pengelola Pembuangan Limbah ke IPAL Domestik;
 - 5) Pelayanan Izin Jasa Rekanan (Tanda Daftar Rekanan) Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) B3 Kabil;
 - 6) Pelayanan Sewa Gudang Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
 - 7) Pelayanan Sewa Lahan KPLI - B3 Kabil;
 - 8) Pelayanan Penyediaan Bibit Pohon Penghijauan;
 - 9) Pelayanan Jasa Persetujuan Ijin Pematangan Lahan;
 - 10) Pelayanan Izin Pemangkasan Pohon Penghijauan dan Izin Penggalian Lokasi Taman dan *Land Clearing*;
 - 11) Pelayanan Jasa Mini Garden dan Dekorasi;
 - 12) Pelayanan Izin Penggunaan Sementara Bagian ROW/ *Buffer*;

- 13) Pelayanan Sewa Kamar Rumah Susun;
 - 14) Pelayanan Pemanfaatan Kandang dan Tapak Kandang Sapi dan Kambing;
 - 15) Pelayanan Jasa Pemotongan Sapi dan Kambing;
 - 16) Pelayanan Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian dan Perikanan.
6. Biro Keuangan, memiliki 2 jenis layanan, yaitu:
 - 1) Administrasi Keuangan;
 - 2) Layanan Rencana Program Kerja Anggaran dan Revisi Anggaran.
 7. Direktorat Infrastruktur Kawasan, memiliki 2 jenis layanan meliputi:
 - 1) Pelayanan Ijin Penempatan Reklame;
 - 2) Laboratorium Uji Tanah.
 8. Kantor Perwakilan Jakarta, memiliki layanan penginapan yaitu Kuningan Guest House.
 9. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, memiliki 19 jenis layanan meliputi:
 - 1) Pelayanan Izin Usaha (Registrasi Usaha);
 - 2) Pelayanan Penetapan sebagai Importir Terdaftar Produk Tertentu;
 - 3) Pelayanan Izin Pemasukan Barang dan Barang Modal Bukan Baru;
 - 4) Pelayanan Penetapan sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol;
 - 5) Pelayanan Penetapan sebagai Importir Terdaftar Kendaraan Bermotor;
 - 6) Pelayanan Penetapan sebagai Importir Terdaftar Alat Pertanian;
 - 7) Pelayanan Penetapan sebagai Importir Produsen Plastik;
 - 8) Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal;
 - 9) Pelayanan Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 - 10) Pelayanan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
 - 11) Pelayanan Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal;
 - 12) Pelayanan Perubahan Izin Usaha Penanaman Modal;
 - 13) Pelayanan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal;
 - 14) Pelayanan Izin Usaha Penanaman Modal;
 - 15) Pelayanan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - 16) Pelayanan Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger);
 - 17) Pelayanan Pembatalan Pendaftaran / Persetujuan Penanaman Modal;
 - 18) Pelayanan Pencabutan Izin Usaha Penanaman Modal;
 - 19) Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal Importir.
 10. Biro Perencanaan Program Strategis, memiliki satu jenis layanan yaitu Pelayanan Jasa Persetujuan Izin Fatwa Planologi.

- b. Unit Kerja Layanan Pendukung yang memberikan layanan internal BP Batam sebanyak 7 Unit Kerja, dengan rincian sebagai berikut:
1. Biro Umum, memiliki 2 jenis layanan terdiri dari:
 - 1) Pelayanan Kerumahtanggaan Internal BP Batam;
 - 2) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, memiliki 1 jenis layanan yaitu Layanan Kepegawaian BP Batam.
 3. Biro Hukum, memiliki 1 jenis layanan yaitu Layanan Bantuan Hukum.
 4. Pusat Harmonisasi Kebijakan, memiliki 3 jenis layanan yaitu:
 - 1) Penelitian dan Sinkronisasi Kebijakan;
 - 2) Pelayanan Pentarifan;
 - 3) Pelayanan Teknologi Informasi.
 5. Biro Humas, Promosi dan Protokol, memiliki 1 jenis layanan yaitu Layanan Kehumasan, Promosi dan Protokol BP Batam.
 6. Direktorat Pengamanan Aset, memiliki 2 jenis layanan yaitu:
 - 1) Layanan Pemadam Kebakaran;
 - 2) Layanan Pengamanan Aset Investasi.
 7. Satuan Pemeriksa Internal, memiliki 1 jenis layanan yaitu Layanan Audit Internal BP Batam.

H. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan BP Batam sebanyak 2.642 karyawan dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN	JUMLAH
PNS	3
NON PNS	3
POLRI	0
TNI	0
SUBTOTAL	6
II. PEGAWAI TETAP PNS/POLRI	JUMLAH
PNS DPK	64
PNS DPB	1540
PNS TGS	3
CPNS DPB	1
POLRI	2
SUBTOTAL	1610
III. PEGAWAI TETAP PNS/POLRI	JUMLAH
NON PNS	571
CAPEG NON	0
SUBTOTAL	571
JUMLAH PEGAWAI TETAP	2187
IV. PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P2K)	JUMLAH
STRUKTURAL	0
P2K PELAKSANA	437
STAFF KHUSUS	4
STRUKTURAL	4
TENAGA AHLI	10
JUMLAH PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P2K)	455
GRAND TOTAL	2642

Tabel 1.1. Jumlah SDM BP Batam

I. Lingkungan Strategis yang Bepengaruh

Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats*)

Internal	Kekuatan (Strengths) <ol style="list-style-type: none"> 1. Asset yang besar; 2. Jumlah SDM yang banyak; 3. Memiliki kewenangan/ Legalitas dalam pengelolaan KPBPB - Batam; 4. Tersedianya Produk Perencanaan dan Penelitian yang dihasilkan 5. Hubungan kerjasama yang baik dengan investor, asosiasi dan pemerintah; 6. Pelayanan ke Stakeholder sudah menggunakan sistem Online Single Submission; 7. Keterbukaan Publik / transparansi dalam penyampaian informasi; 8. Responsif terhadap keluhan stakeholders. 	Kelemahan (Weakness) <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM belum sesuai dengan standar kebutuhan pekerjaan; 2. Jumlah SDM belum sesuai dengan standar kebutuhan pekerjaan; 3. Pengelolaan asset belum optimal sehingga salah satunya menyebabkan penerimaan belum optimal; 4. Hasil Kordinasi dan komunikasi yang dilakukan belum optimal; 5. Kurangnya publikasi terhadap rencana program dan kegiatan; 6. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK).
Eksternal	Peluang (Opportunities) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Wilayah kewenangan KPBPB-Batam (Barelang dan sekitarnya); 2. Tumbuhnya ASEAN menjadi blok ekonomi yang penting; 3. Potensi pengembangan jasa, logistik dan kepariwisata di kawasan KPBPB – Batam; 4. Pemindahan lokasi perusahaan akibat globalisasi; 5. Munculnya sektor ekonomi baru seperti industri hijau dan ICT; 6. Investasi yang dapat di kembangkan akibat dari perang dagang antara negara adikuasa (USA dan China). 	Ancaman (Threats) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan pergantian pimpinan internal KPBPB Batam yang cukup sering berubah; 2. Pengaruh politik dalam pengambilan keputusan strategis; 3. Globalisasi dan TIK yang cepat berubah dan berkembang; 4. Kompetisi kawasan industri lainnya di regional asia pasifik; 5. Masih adanya aturan/ regulasi yang kurang berpihak terkait penanaman investasi / modal di KPBPB- Batam; 6. Publikasi negatif oleh media terkait dalam pengelolaan KPBPB – Batam; 7. Meningkatnya arus tenaga kerja asing ke Batam terkait diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Tabel 1.2. Analisis SWOT

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Memperhatikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam periode sebelumnya, dan dimulainya acuan baru kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan (BP) Batam Tahun 2020—2024, maka telah ditetapkan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan sasaran strategis BP Batam hingga 5 tahun ke depan.

Delapan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Investasi;
2. Realisasi Investasi;
3. Program Dukungan Kegiatan Investasi;
4. Realisasi Jumlah PNBPN;
5. Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik;
6. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU;
7. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK;
8. Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan.

Penetapan IKU tersebut telah memenuhi kriteria minimum sebagai indikator kinerja yang baik, antara lain:

1. spesifik dan jelas terhadap hasil atau capaian kinerja (tujuan/sasaran/ *outcomes*);
2. keterukuran (*measurability*) dan keterkaitan (*relevance*) terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
3. indikator yang ditetapkan dapat dicapai (*achievable*) oleh organisasi;
4. menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu (*timebound*).

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Pengusahaan Batam 2020—2024. Renstra yang disusun bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, merupakan dasar dari perencanaan dan harus diimplementasikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam. Penyusunan Renstra pun telah mengikuti pola, berupa tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif.

A.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi pemerintah, dalam hal ini BP Batam.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2015—2019, serta memperhatikan hasil analisis isu strategis dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024, tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka visi pembangunan BP Batam tahun 2020—2024 seperti yang tertulis di dalam Renstra BP Batam 2020-2024 adalah

**“BP Batam memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi
untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong”**

A.2. Misi

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut maka ditetapkan misi BP Batam, sebagai berikut:

- 1. Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif;**
- 2. Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif;**
- 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam;**
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam;**
- 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan;**
- 6. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam.**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut Badan Pengusahaan Batam, dalam Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 161 Tahun 2015, menetapkan nilai-nilai Budaya Kerja, yang disingkat dengan SPIRIT, sebagai berikut

1. Service Excellence.

Dalam *Service Excellence* terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

2. Professional.

Dalam *Professional* terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

3. Innovative.

Dalam *Innovative* terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam menggunakan dengan optimal semua sumber daya yang ada dengan kreatifitas tinggi untuk menghasilkan perbaikan dan perubahan positif yang berkelanjutan ke arah kemajuan.

4. Integrity.

Dalam *Integrity* terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata dan berperilaku dan bertindak, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya dengan baik dan benar, konsisten serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

5. Entrepreneurship.

Dalam *Entrepreneurship* terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam memiliki jiwa dan perilaku menciptakan peluang usaha dengan mempertimbangkan risiko.

A.3. Tujuan

Berdasarkan pada faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*), selanjutnya untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam ditetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan strategi yang tepat untuk digunakan dalam pencapaian dimaksud. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengusahaan Batam dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah meningkatkan investasi pada sektor industri, jasa, hub logistik, dan pariwisata di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Melalui tujuan di atas maka diharapkan akan menarik dan mengembangkan investasi dalam sektor industri, perdagangan, alih kapal (*transshipment*) dan pariwisata, juga dapat lebih mengembangkan, serta membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai dalam mendukung pengembangan pembangunan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

A.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan lima tahun ke depan maka sasaran strategis Badan Pengusahaan Batam telah ditetapkan dalam tiap tahun anggaran dan merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu juga menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui rangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Badan Pengusahaan Batam dalam menetapkan sasaran adalah bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis. Untuk mencapai tujuan sebagaimana Apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama halnya seperti sasaran terhadap tujuan, program-

program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Sasaran Badan Pengusahaan Batam tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Investasi pada Kawasan Pengusahaan;
2. Kinerja Pendapatan;
3. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengembangan Sistem Informasi BLU;
5. Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi;
6. Inovasi Pelayanan.

Berikut adalah tabel keterkaitan antara sasaran dan indikator kinerja:

Sasaran	Indikator Kinerja
1.1. Investasi pada Kawasan Pengusahaan	1.1.1. Komitmen Investasi
	1.1.2. Realisasi Investasi
	1.1.3. Program Dukungan Kegiatan Investasi
1.2. Kinerja Pendapatan	1.2.1. Realisasi Jumlah PNPB
1.3. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	1.3.1. Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik
1.4. Pengembangan Sistem Informasi BLU	1.4.1. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU
1.5. Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	1.5.1. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
1.6. Inovasi Pelayanan	1.6.1. Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan

Tabel 2.1 Uraian Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja BP Batam

A.5. Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dipilih strategi yang tepat sehingga dapat mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan strategis BP Batam, merupakan pedoman dalam penyusunan sasaran strategi dan program kerja yang direncanakan dan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang akan datang dan diharapkan memiliki dampak yang positif terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis BP Batam dengan mempertimbangkan potensi sumber daya BP Batam dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Bersamaan dengan hal tersebut, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan BP Batam telah dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan dalam upaya mencapai visi misi BP Batam, serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Keempat (2020—2024) yang dirumuskan dalam NAWACITA yang memiliki agenda, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum dan pertahanan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Arah Kebijakan dan Strategi Nasional bagi pencapaian sasaran dan prioritas nasional, maka strategi dan arah Kebijakan BP Batam 5 tahun kedepan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan investasi dalam membentuk iklim usaha yang sehat serta penerapan reformasi birokrasi yang utuh dalam upaya menjadi penghela ekonomi nasional. Untuk itu BP Batam telah menyusun agenda pembangunan yang diharapkan dapat menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan baik bagi pihak stakeholders maupun melakukan pembenahan kedalam (internal) dengan berpedoman pula pada roadmap pengembangan kawasan Batam Bintan Karimun tahun 2010-2020.

Adapun arah kebijakan dan strategi BP-Batam yang tertuang dalam agenda pembangunan BP-Batam sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas;
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing;
- c. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- d. Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan akibat adanya perubahan iklim;
- e. Memperkuat dan mempercepat transformasi pelayanan publik;
- f. Memberikan dampak bagi pengembangan Kawasan disekitarnya yaitu untuk Bintan dan Karimun.

A.5.1. Arah Kebijakan

Pengelolaan dan pengembangan KPBPB-Batam yang dilakukan BP-Batam diarahkan tidak hanya difokuskan kepada pengembangan Batam sebagai kawasan ekonomi yang handal akan tetapi menjadi salah satu kontributor pembangunan ekonomi nasional dengan memperhatikan suatu pengembangan wilayah ekonomi dan investasi yang terencana. Oleh karena itu pengelolaan KPBPB-Batam perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan

ekonomi dan investasi terpadu oleh seluruh sektor yang mengacu pada segala aspek aktifitas ekonomi, investasi, sosial, lingkungan, potensi kewilayahan dan perairan serta daya dukung kawasan wilayah KPBPB-Batam.

Selanjutnya pengembangan Barelang tidak hanya berfokus kepada Batam saja tetapi harus memberikan dampak pembangunan bagi Kawasan sekitarnya yaitu Bintan dan Karimun sehingga Batam berkembang untuk industri yang bernilai tambah tinggi sedangkan industri yang masih menggunakan tenaga kerja yang low skill dan medium dapat dikembangkan kepada kedua daerah tersebut.

Dalam konteks pengembangan kawasan pengembangan ekonomi dan investasi, maka untuk memudahkan dalam merencanakan memonitor dan mengevaluasi pengembangan pengelolaan KPBPB-Batam, arah kebijakan dalam pelaksanaan mengacu pada beberapa hal:

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan KPBPB –Batam;
2. Melaksanakan peningkatan kapabilitas aparatur/ SDM BP Batam yang berbasis kompetensi;
3. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparatur/ SDM BP Batam pada pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis;
4. Melaksanakan sistem pelayanan perizinan investasi dalam satu unit dan berbasis teknologi informasi;
5. Melaksanakan pembuatan database berupa big data di Batam;
6. Melaksanakan pola marketing mix yang terarah dan terfokus pada bidang prioritas;
7. Melaksanakan pola praktek bisnis yang sehat dalam memanfaatkan asset-aset yang ada;
8. Melaksanakan pembangunan dengan terencana yang mengacu pada rencana induk yang berstandar internasional dan berwawasan lingkungan.

A.5.2. Strategi

Untuk mewujudkan arah kebijakan yang telah ditetapkan sehingga visi dan misi dapat dicapai, disusun fokus strategi sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur pendukung dalam peningkatan iklim investasi di sektor industri, jasa, hub logistik dan pariwisata yang berstandar internasional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan kegiatan yang hendak dicapai diantaranya:

- a. Pengembangan jaringan dan infrastruktur darat untuk meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat aktivitas sektor prioritas;
 - b. Pengembangan Bandara Hang Nadim Batam yang merupakan salah satu akses utama ke KPBPB Batam;
 - c. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan laut di KPBPB Batam;
 - d. Pengelolaan air baku dan limbah di KPBPB Batam untuk menunjang pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan kawasan yang profesional dan inovatif. Dengan kegiatan yang hendak dicapai diantaranya:
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan internal, melalui strategi penyempurnaan sistem dan manajemen serta pelaporan dalam pengelolaan KPBPB;
 - b. Penerapan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi guna mendukung bisnis proses yang efektif, efisien dan transparan, melalui strategi penguatan kebijakan dalam IT yang mendukung *e-government* dan *e-corporate* ataupun *e-investment*;
 - c. Penyempurnaan kelembagaan KPBPB Batam, mencakup penataan tugas, fungsi dan sumber kewenangan serta harmonisasi antar lembaga, institusi maupun instansi, dengan strategi penyempurnaan desain struktur pengelolaan KPBPB Batam yang lebih efisien;
 - d. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No.14 tahun 2008, melalui strategi pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas oleh pengelola KPBPB Batam;
 - e. Mendorong publik untuk memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan KPBPB Batam, melalui strategi pemanfaatan media sosial dan layanan website BP Batam untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi antara pengelola KPBPB Batam dengan pemerintah maupun masyarakat;
 - f. Meningkatkan pelayanan dasar bagi investor melalui strategi sinkronisasi dan atau harmonisasi kerangka regulasi serta kebijakan pemerintah terutama dalam aturan perdagangan kegiatan yang berhubungan dengan ekspor dan impor;
 - g. Membuka kesempatan kerja pada sektor industri dengan strategi meningkatkan iklim investasi teknologi dan inovasi;
 - h. Meningkatkan hasil penerapan penelitian dan pengembangan;

- i. Perencanaan pengembangan dan pemanfaatan wilayah Bareleng (Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru) secara rinci;
- j. Penyempurnaan rencana tata ruang dan rencana detail KPBPB-Batam yang diminati investor yang berwawasan maritim dan lingkungan;
- k. Mengembangkan pemberdayaan usaha melalui strategi pemberdayaan dan perluasan akses permodalan baik dalam maupun luar negeri;
- l. Mendorong pembiayaan infrastruktur, dengan pola strategi KPS/ Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan creative financing lainnya; serta memberlakukan mekanisme *risk sharing*, insentif dan disinsentif;
- m. Meningkatkan aktivitas perdagangan melalui strategi mendorong pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu, serta lalu lintas barang terutama di bandara dan pelabuhan yang menjadi hub internasional;
- n. Kegiatan promosi investasi yang potensial dalam mendukung 4 sektor prioritas pembangunan.

Berikut di bawah ini ditampilkan alur visi yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja BP Batam, yaitu:

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Utama
BP Batam memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1) Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif	Meningkatkan investasi pada sektor industri, jasa, hub logistik, dan pariwisata di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam	1.1 Investasi pada Kawasan Pengusahaan	1.1.1 Komitmen Investasi 1.1.2 Realisasi Investasi 1.1.3 Program Dukungan Kegiatan Investasi
	2) Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif		2.1 Kinerja Pendapatan	2.1.1 Realisasi Jumlah PNBPN
	3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam		3.1 Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	3.1.1 Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik
	4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam		4.1 Pengembangan Sistem Informasi BLU	4.1.1 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU
	5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan		5.1 Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	5.1.1 Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
	6) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam		6.1 Inovasi Pelayanan	6.1.1 Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM, dan Lingkungan

Tabel 2.2. Alur Visi – Misi BP Batam 2020

A.6. Program

Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan sebelumnya, Badan Pengusahaan Batam menetapkan kebijakan dan program periode 2020-2024 sebagai arah yang akan diambil sesuai dengan misinya. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta akan memperoleh alokasi anggaran.

Program tahun 2020 yang disusun merupakan upaya pencapaian sasaran pada Renstra Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam 2 (dua) program sebagaimana berikut:

1. Program Dukungan Manajemen; merupakan program yang bersifat internal BP Batam untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan BP Batam. Program ini dijalankan oleh 2 (dua) Keanggotaan yaitu Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan dan Anggota Bidang Kebijakan Strategis yang meliputi Unit Kerja Eselon II di Biro Umum, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Hukum, Kantor Perwakilan Jakarta, Biro Humas Promosi dan Protokol, Pusat Perencanaan Program Strategis, Pusat Harmonisasi Kebijakan, dan Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK.
2. Program Pengembangan Kawasan Strategis; merupakan program pembangunan BP Batam yang ditujukan untuk menghasilkan pelayanan bagi masyarakat dan stakeholders. Program ini dijalankan oleh 2 (dua) Keanggotaan yaitu Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi dan Anggota Bidang Pengusahaan dengan Unit Kerja Eselon II meliputi Direktorat Pengelolaan Lahan, Direktorat Infrastruktur Kawasan, Direktorat Layanan Penanaman Modal dan Lalu Lintas Barang, Direktorat Pengamanan Aset, Direktorat Restrukturisasi, Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, Direktorat Evaluasi dan Pengendalian serta Unit Usaha BP Batam.

A.7. Rencana Kinerja

Penjabaran dari Renstra BP Batam Tahun 2020—2024 yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam). Rencana kinerja BP Batam Tahun 2020 ditetapkan program, kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan pokok (Misi 1)

Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif

- a. Investasi pada Kawasan Pengusahaan
Dengan indikator kinerja sasaran:
 - 1. Komitmen Investasi
 - 2. Realisasi Investasi
 - 3. Program Dukungan Kegiatan Investasi

Kegiatan pokok (Misi 2)

Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif

- a. Kinerja Pendapatan
Dengan indikator kinerja sasaran:
 - 1. Realisasi Jumlah PNB

Kegiatan pokok (Misi 3)

Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam

- a. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi
Dengan indikator kinerja sasaran:
 - 1. Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik

Kegiatan pokok (Misi 4)

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam

- a. Pengembangan Sistem Informasi BLU
Dengan indikator kinerja sasaran:
 - 1. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Kegiatan pokok (Misi 5)

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan

- a. Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi
Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK

Kegiatan pokok (Misi 6)

Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam

- a. Inovasi Pelayanan

Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM, dan Lingkungan.

Dari tabel dibawah ini dapat dilihat antara hubungan IKU dan Unit Kerja yang bertanggung jawab:

TUJUAN SASARAN	IKU		PROGRAM/KEGIATAN	UNIT PELAKSANA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam				
Investasi pada Kawasan Pengusahaan	Program Dukungan Kegiatan Investasi		Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBPN		Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Biro Keuangan
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi, Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK		Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	Biro Hukum
Investasi pada Kawasan Pengusahaan, Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Realisasi Investasi	Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	Biro Humas, Promosi dan Protokol
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBPN		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	Kantor Perwakilan
Investasi pada Kawasan Pengusahaan, Kinerja Pendapatan	Program Dukungan Kegiatan Investasi	Realisasi Jumlah PNBPN	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	Pusat Perencanaan Program Strategis
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi, Pengembangan Sistem Informasi BLU	Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	Pusat Harmonisasi Kebijakan
Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK		Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	Pusat Harmonisasi Kebijakan
Inovasi Pelayanan	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan		Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK

Program Pengembangan Kawasan Strategis				
Investasi pada Kawasan Pengusahaan, Kinerja Pendapatan	Realisasi Nilai Investasi	Realisasi Jumlah PNBP	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan BBPB-Batam	Direktorat Pengelolaan Lahan
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan BBPB-Batam	Direktorat Pengelolaan Lahan
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBP		Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Direktorat Infrastruktur Kawasan
Kinerja Pendapatan, Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Realisasi Jumlah PNBP	Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal
Investasi pada Kawasan Pengusahaan	Realisasi Nilai Investasi		Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	Direktorat Pengamanan Aset
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBP		Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Direktorat Restrukturisasi
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBP		Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko
Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBP		Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Direktorat Evaluasi dan Pengendalian
Kinerja Pendapatan, Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Realisasi Jumlah PNBP	Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi Informasi	Badan Usaha Bandara dan Teknologi Informasi
Kinerja Pendapatan, Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Realisasi Jumlah PNBP	Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Badan Usaha Pelabuhan
Kinerja Pendapatan, Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Realisasi Jumlah PNBP	Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Badan Usaha Rumah Sakit

Kinerja Pendapatan, Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Realisasi Jumlah PNB	Pencapaian Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Publik	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
Pengembangan Sistem Informasi BLU, Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	Satuan Pemeriksa Intern

Tabel 2.3. Hubungan Kegiatan Terhadap IKU

B. Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja BP Batam adalah sebagai berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	T A R G E T	REALISASI	
				JUMLAH	CAPAIAN %
1	Investasi pada Kawasan Pengusahaan.	1.1. Komitmen Investasi	\$ 1.500.000.000,00	21.491.950.058,- (US \$)	1432,80
		1.2. Realisasi Investasi	\$ 1.000.000.000,00	1.355.234.319,- (US \$)	135,52
		1.3. Program Dukungan Kegiatan Investasi	100%	46%	46
2	Kinerja Pendapatan.	Realisasi Jumlah PNBPN. (Juta Rupiah)	Rp1.020.315.337.000,00	Rp1.307.540.308.450,79	128,15
3	Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi.	Pencapaian Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Publik.	≥ 81,00 (Skala 1 - 100) (Predikat Baik)	84,10 (baik)	103,83
4	Pengembangan Sistem Informasi BLU.	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU.	100%	83%	83
5	Pengelolaan BP Batam Yang Bebas dari Korupsi.	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK.	100%	80,00%	80
6	Inovasi Pelayanan.	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan.	3 Destinasi	57,50%	57,5

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja: Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Pengukuran Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator kinerja yang digunakan terdiri dari indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator-indikator tertentu (*outputs* atau *outcomes*) yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra BP Batam 2020-2024. Indikator *inputs* adalah semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan keluaran, yaitu berupa dana, sumber daya manusia, informasi, dan sebagainya. Indikator *outputs* adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung, baik berupa fisik maupun nonfisik. Indikator *outcomes* adalah suatu gambaran dari hasil nyata suatu kegiatan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh lingkungan di sekitarnya.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

1. Analisis Capaian Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja Badan Pengusahaan Batam dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

Badan Pengusahaan Batam dalam tahun 2020 telah menetapkan 6 Sasaran Strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, dan secara detail capaian kinerja sasaran diuraikan berikut ini.

Sasaran *Pertama* adalah Investasi Pada Kawasan Pengusahaan. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 indikator, yaitu:

1. Komitmen Investasi;
2. Realisasi Investasi;
3. Program Dukungan Kegiatan Investasi.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	(%)
1		2		3	4	5
1	Investasi pada Kawasan Pengusahaan	1	Komitmen Investasi	1.500.000.000,- (US \$)	21.491.950.058,- (US \$)	1432.80
		2	Realisasi Investasi	1.000.000.000,- (US \$)	1.355.234.319,- (US \$)	135.52
		3	Program Dukungan Kegiatan Investasi	100%	46%	46.00

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran Ke-1

Investasi PMA pada Kawasan Pengusahaan merupakan sasaran pertama dalam sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Komitmen Investasi target US\$ 1.500.000.000,- dan Realisasi Investasi dengan target US\$ 1.000.000.000,-. Pencapaian investasi PMA pada Kawasan Pengusahaan dalam Komitmen Investasi sebesar \$ 21.491.950.058,- dengan Kursu 1 USD = Rp 14.500,- setara Rp 311.633.275.841.000 dan Realisasi Investasi sebesar \$ 1.355.234.319,- dengan Kursu 1 USD = Rp 14.500,- setara Rp 19.650.897.625.500,-. Kemudian program dukungan kegiatan investasi terealisasi sebesar 46%, sehingga keseluruhan indikator mencapai realisasi tingkat pelaksanaan sebesar 428.51% dari target untuk tahun 2020. Data yang diolah merupakan data realisasi investasi, data sampai Semester 2, dalam OSS hanya mata uang rupiah dan belum bisa dipisahkan data komitmen dan realisasi investasi. BP Batam telah mengupayakan Program Dukungan Kegiatan Investasi, salah satunya adalah dengan adanya pemanfaatan lahan yang telah habis izin lokasi terealisasi sebesar 34% dan pemanfaatan lahan terlantar terealisasi sebesar 12%.

Sasaran *Kedua* adalah Kinerja Pendapatan. Secara signifikan Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Realisasi Jumlah PNBPNP.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	(%)
1		2		3	4	5
1	Kinerja Pendapatan	1	Realisasi jumlah PNBPNP	Rp1.020 Triliun	Rp1.307 Triliun	128,15

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran ke-2

Realisasi Jumlah PNBPN dapat dilihat melalui Pendapatan Kantor Pusat dengan realisasi sebesar Rp 659.266.831.901,- persentase capaian sebesar 180.35% dan Pendapatan Kantor Mandiri dengan realisasi sebesar Rp 648.273.476.549,- persentase capaian sebesar 99.01%. Indikator Realisasi Jumlah PNBPN yang ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar Rp1.020 Triliun. Realisasi Jumlah PNBPN Batam secara keseluruhan mencapai realisasi tingkat pelaksanaan sebesar 128,15% atau sebesar Rp1.307 Triliun dari target Tahun 2020.

Sasaran *Ketiga*, Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Pencapaian Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Publik.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	(%)
1		2		3	4	5
1	Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	1	Pencapaian Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Publik	≥ 81.00 (Skala 1 – 100) Atau predikat baik.	84.10 (predikat baik)	103.83

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran ke-3

Pencapaian Kepuasan *Stakeholder* terhadap Pelayanan Publik BP Batam mendapatkan 84.10 (predikat baik) dari target ≥ 81.00 . Pedoman untuk perhitungan skala kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik adalah Permenpan RB 14/2017. Kepuasan *stakeholder* merupakan hasil dari pelayanan. BP Batam telah mengupayakan pencapaian kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan publik yaitu melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh unit layanan PTSP BP Batam dengan realisasi sebesar 81.46%, Rumah Susun BP Batam dengan realisasi sebesar 79.99%, Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan realisasi sebesar 85.80%, Bandara Hang Nadim dengan realisasi sebesar 88.31%, Rumah Sakit BP Batam dengan realisasi sebesar 88.45%, dan Kantor Pelayanan Air Bersih dengan realisasi sebesar 80.58%. Walaupun telah memenuhi 103.83% realisasi, BP Batam akan terus meningkatkan pelayanan publik yang maksimal kepada *stakeholder*.

Sasaran *Keempat*, Pengembangan Sistem Informasi BLU. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	83%	83

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran ke-4

Indikator tingkat Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU telah direalisasikan sebesar 83% sesuai dengan target tahun 2020, dalam realisasinya BP Batam belum memenuhi target sebesar 100%. Adapun capaian tersebut diperoleh dari 8 (delapan) variabel kinerja antara lain: Operasional Aplikasi BIOS memiliki realisasi sebesar 20% dari target 20%, Ketersediaan *Website* yang Representatif memiliki realisasi sebesar 10% dari target 10%, Ketersediaan Database yang Terpusat memiliki realisasi sebesar 10% dari target 10%, Ketersediaan *Dashboard* Internal dan Eksternal memiliki realisasi sebesar 8% dari target 10%, Ketersediaan *Web Service* untuk Transfer Data ke Kementerian Keuangan tidak terealisasi dari target 15%, Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem yang Memanfaatkan Teknologi Informasi memiliki realisasi sebesar 10% dari target 10%, Ketersediaan dan Implementasi Sistem Aplikasi untuk Pengelolaan Tata Naskah Dinas Secara Elektronik memiliki realisasi sebesar 10% dari target 10%, dan Implementasi Inovasi di Bidang Teknologi Informasi untuk Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Keuangan memiliki realisasi sebesar 15% dari target 15%. Hal ini menjadi evaluasi dan dorongan untuk BP Batam kedepannya untuk mendorong perbaikan dalam pengembangan sistem informasi BLU. Modernisasi dan simplifikasi di BP Batam akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran yang mudah dan cepat dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Sasaran *Kelima*, Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	100%	80%	80

Tabel 3.5. Indikator Kinerja Sasaran Ke-5

Berdasarkan hasil evaluasi internal BP Batam, Pembangunan Zona integritas menuju WBK di BP Batam terus dilakukan selama tahun 2020 dan 80% dari target 100% Pembangunan Zona Integritas di seluruh daerah yang dikelola oleh BP Batam telah direalisasikan. Adapun capaian tersebut diperoleh dari 4 (empat) variabel kinerja antara lain: Peta Jabatan dan Analisa Beban Kerja dengan capaian realisasi sebesar 40%, Penyusunan Perka Gratifikasi dengan capaian realisasi sebesar 20%, dan Penetapan Perka Pedoman Agen Perubahan dengan capaian realisasi sebesar 20%. Pada tahun 2019 telah ditandatangani pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tetapi terkait dengan adanya perubahan SOTK, sehingga pada tahun 2019 hingga saat ini BP Batam masih dalam proses mengajukan 2 (dua) unit kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan predikat WBK yang tertunda dan akan terus dilakukan perbaikan untuk ditahun mendatang.

Sasaran *Keenam*, Inovasi Pelayanan. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Innovasi Pelayanan	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan	3 Destinasi	57.50%	57,50

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Sasaran Ke-6

Indikator tingkat Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan ditargetkan pada tahun 2020 sebanyak 3 destinasi, telah direalisasikan

sebesar 57.50% dari target 2020 sebesar 100%. Pencapaian indikator tersebut diidentifikasi melalui:

Lokasi Wisata	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Nilai	Total
Taman Rusa - Sekupang	40%	20%	50%	35%	17.50%	57.50%
Taman Kolam - Sekupang	30%	20%	67%	45%	30.00%	
Fisherism – Tg. Riau	20%	10%	50%	20%	10.00%	

2. Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tersaji dalam perjanjian kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2020, menunjukkan capaian sasaran strategis dengan nilai rata-rata capaian sebesar 146.83%. Belum maksimalnya pencapaian realisasi kinerja BP Batam di pengaruhi oleh program dukungan kegiatan investasi, dimana penyelesaian perjanjian lahan dan penyelesaian perjanjian pemasukan barang tidak terealisasi karena melebihi waktu 1 (satu) hari. Kemudian, hingga saat ini BP Batam masih dalam proses mengajukan 2 (dua) unit kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan predikat WBK yang tertunda. Adapun capaian sasaran strategis untuk indikator kinerja utama pada 2020 dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Total (%)
1.	Investasi pada Kawasan Pengusahaan	1.1 Komitmen Investasi	1.500.000.000,- (US \$)	21.491.950.058,- (US \$)	358,20	428,51
		1.2 Realisasi Investasi	1.000.000.000,- (US \$)	1.355.234.319,- (US \$)	54,21	
		1.3 Program Dukungan Kegiatan Investasi	100%	46%	16,10	
2.	Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNBPNP	Rp1,020 Triliun	Rp1,307 Triliun	128,15	128,15
3.	Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Pencapaian Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Publik	≥ 81,00 (skala 1-100) (Predikat Baik)	84,10 (Baik)	103,83	103,83
4.	Pengembangan Sistem BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	83%	83,00	83,00
5.	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	100%	80%	80,00	80,00
6.	Innovasi Pelayanan	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan	3 Destinasi	57,50%	57,50	57,50
Rata-rata						146,83

Tabel 3.7 Capaian IKU 2020

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN tahun 2020 dan 2019

Realisasi Penerimaan (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) tahun 2020 sebesar Rp1,307 Triliun atau 128,15% dari target PNBPN sebesar Rp1,020 Triliun dengan rincian per unit sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

NO	UNIT PENGHASIL	PENERIMAAN		
		TA. 2020		
		TARGET	REAL (s/d 31 Des 2020)	% REAL
A	KANTOR PUSAT	365,547.00	659,266.83	180.35
1	Direktorat Pengelolaan Lahan	328,623.00	612,554.60	186.40
2	Direktorat Infrastruktur Kawasan	1,560.00	2,057.68	131.87
3	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	1,314.00	1,022.29	77.78
4	Biro Keuangan	34,050.00	43,632.26	128.14
B	UNIT MANDIRI	654,576.00	648,040.54	99.00
1	Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	126,339.00	148,378.71	117.44
2	Badan Usaha Pelabuhan	318,773.00	339,460.84	106.49
3	Badan Usaha Rumah Sakit	156,636.00	114,190.75	72.90
4	Badan Usaha Fasilitas Lingkungan	52,828.00	46,010.24	87.09
5	Kantor Perwakilan Jakarta	192.00	233.00	121.61
C	TOTAL PENERIMAAN (A+B)	1,020,123.00	1,307,307.37	128.15

Tabel 3.8. Realisasi PNBPN 2020

Jika dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) tahun 2019 adalah sebesar Rp1,330 Triliun atau 104,5% dari target PNBPN sebesar Rp1,273 Triliun dengan rincian per unit sebagai berikut:

NO	UNIT PENGHASIL	PENERIMAAN (Juta Rupiah)		
		TA. 2019		
		TARGET	REAL (s/d 31 Des 2019)	% REAL
A	KANTOR PUSAT	61,650.00	74,560.90	120.94
1	Direktorat Pemanfaatan Aset	22,000	4,802.05	72.96
2	Direktorat Prasarana dan Sarana	5,500	8,426.53	87.31
3	Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	15,000	1,191.27	56.18
4	Direktorat Lalu Lintas Barang	150	44,090.08	794.18
5	Biro Keuangan	19,000	16,050.98	232.05
B	UNIT MANDIRI	1,211,657.50	1,256,024.30	103.66
1	Direktorat Pengelolaan Lahan	300,000	575,687.78	191.90
2	BUBU Hang Nadim	278,007	201,893.46	72.62
3	Kantor Pelabuhan Laut	530,450	359,220.28	67.72
4	Rumah Sakit BP Batam	60,000	88,625.81	147.71
5	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	42,000	29,628.60	70.54
6	Kantor Perwakilan Jakarta	1,200	968.37	80.70
C	TOTAL PENERIMAAN (A+B)	1,273,307.50	1,330,585.21	104.50

Tabel 3.9. Realisasi PNBPN 2019
(Sumber: Laporan Keuangan Audited BP Batam 2019)

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penerimaan tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan penerimaan sebesar 23.65%.

2. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2020 dan 2019

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 sebesar 71.01% dengan total penyerapan sebesar Rp 1.560.875.000.000 dari pagu yang diberikan sebesar Rp 2.198.102.000.000. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.552.078.118.039 atau mencapai 75.19% dari pagu yang diberikan sebesar 2.064.194.953.000, terdapat kenaikan jumlah anggaran sebesar Rp 672.386.949.000 dan kenaikan penyerapan anggaran sebesar Rp 8.796.881.961.

(Dalam Rupiah)

NO	KODE	KEGIATAN	TA. 2019			NO	KODE	KEGIATAN	TA. 2020		
			PAGU	REALISASI	%				PAGU	REALISASI	%
1	A	Belanja RM	340.000.000.000	279.845.304.392	82,31	1	A	Belanja RM	314.310.000.000	218.608.000.000	69,55
2	B	Belanja PHLN	195.621.568.000	127.644.826.303	65,92	2	B	Belanja PHLN	188.890.000.000	132.000.000	0,07
3	C	Belanja RMP-PHLN	15.961.896.000	2.547.377.211	18,25	3	C	Belanja RMP-PHLN	35.290.000.000	31.209.000.000	88,44
4	D	Belanja PNEP	1.516.611.489.000	1.142.040.610.131	75,30	4	D	Belanja PNEP	1.659.622.000.000	1.310.926.600.000	78,99
5	5113	Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan	13.604.378.000	11.448.896.682	73,37	5	5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	38.421.581.000	30.633.762.000	79,73
6	5114	Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	139.888.485.000	103.135.943.843	73,73	6	5114	Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	288.199.956.000	172.498.770.000	59,85
7	5115	Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian	634.142.324.000	529.851.486.313	83,55	7	5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	612.906.339.000	521.161.460.000	85,03
8	5116	Pengelolaan Administrasi Keuangan	6.775.373.000	4.673.309.887	68,98	8	5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	7.447.322.000	4.378.888.000	58,80
9	5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	19.260.669.000	8.017.500.336	41,63	9	5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	6.655.876.000	2.633.804.000	39,87
10	5118	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	7.826.987.000	3.703.743.396	47,32	10	5118	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	8.477.060.000	6.371.560.000	75,16
11	5119	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan	19.040.626.000	14.680.465.683	77,10	11	5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	3.933.876.000	1.601.245.000	40,70
12	5120	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha	1.842.022.000	1.588.119.126	86,22	12	3978	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi	25.461.088.000	21.700.303.000	85,23
13	5121	Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi	1.692.683.000	1.111.130.377	65,64	13	3979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	3.986.927.000	3.362.974.000	84,33
14	5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	1.861.915.000	1.661.509.896	89,24	14	3980	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	14.074.883.000	10.095.147.000	71,79
15	5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan Badan Pengusahaan Batam	21.158.774.000	13.474.818.770	63,68	15	5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PEPB Batam	19.052.714.000	10.198.445.000	53,53
16	5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	132.061.400.000	34.347.960.084	26,01	16	5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	51.516.357.000	41.223.694.000	80,02
17	5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara	154.919.898.000	105.864.204.203	68,33	17	5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi Informasi	121.411.826.000	104.748.042.000	86,27
18	5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	153.409.038.000	140.728.233.843	90,53	18	5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	137.821.872.000	147.889.503.000	93,71
19	5127	Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana	30.224.034.000	24.134.191.690	79,53	19	5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	418.141.667.000	276.263.568.000	66,07
20	5128	Pengelolaan Data Centre dan Sistem Informasi	48.602.777.000	42.279.196.182	86,99	20	5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	10.721.870.000	8.264.334.000	77,08
21	5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PEPB Batam	2.310.409.000	1.935.089.359	83,76	21	5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	362.922.431.000	288.237.597.000	79,43
22	5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah	26.778.869.000	20.376.038.370	76,09	22	5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	36.960.858.000	34.822.991.000	94,22
23	5131	Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan	20.759.339.000	11.789.634.003	56,79	23	3981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha EP Batam	4.478.113.000	3.519.802.000	78,60
24	5132	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PEPB Batam	8.184.901.000	7.158.132.198	87,46	24	3982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha EP Batam	1.198.336.000	593.720.000	49,54
25	5133	Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset	28.936.343.000	26.577.941.062	91,85	25	3983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha EP Batam	4.311.048.000	3.236.996.000	75,33
26	5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	39.330.243.000	31.502.782.422	80,10						
TOTAL			2.064.194.953.000	1.552.078.118.039	75,19	TOTAL			2.198.102.000.000	1.560.875.000.000	71,01

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 dan 2019

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Pengusahaan Batam terhadap capaian kinerja selama tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai, Badan Pengusahaan Batam menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Melihat hasil yang dicapai pada tahun kerja 2020 dapat disimpulkan bahwa Badan Pengusahaan Batam telah berupaya secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka pencapaian Visi dan Misi. Dari 6 (enam) Sasaran Strategis yang ditetapkan, masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan, namun kinerja keuangan secara umum melebihi dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2020, menunjukkan capaian sasaran strategis dengan nilai rata-rata capaian sebesar 146,83%.

C. Saran

Langkah yang dapat ditempuh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam untuk tahun selanjutnya meliputi:

1. Perlunya tata kelola Sumber Daya Manusia guna menunjang tugas dan fungsi tiap unit kerja di BP Batam;
2. Perlunya regulasi yang mengatur hubungan kerja antara BP Batam dan stakeholder lainnya agar dapat bersinergi membangun ekonomi Batam;
3. Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan.
4. Perlunya pengembangan inovasi IT dalam rangka peningkatan pelayanan dan pelaporan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2020 yang telah disusun, dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam melalui upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



KONTRAK KINERJA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

TAHUN 2020

Nomor : PRJ-125/PB/2020

Nomor : 513/SPJ/KA/2020

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Rudi
Jabatan : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Andin Hadiyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK PERTAMA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1.	Investasi pada kawasan perusahaan	1.1 Komitmen Investasi	1.500.000.000,- (US \$)
		1.2 Realisasi Investasi	1.000.000.000, (US \$)
		1.3 Program Dukungan Kegiatan Investasi	100%
2.	Kinerja Pendapatan	Realisasi Jumlah PNPB	Rp1,69 Triliun
3.	Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Pencapaian Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Publik	≥ 81,00 (skala 1-100) (Predikat Baik)
4.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%
5.	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	100%
6.	Innovasi Pelayanan	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM dan Lingkungan.	3 Destinasi

2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.
3. PIHAK KEDUA akan melakukan reuvi dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.

PIHAK KEDUA,

Andin Hadiyanto



Muhammad Rudi

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

1.1. Komitmen Investasi

Sasaran Strategis	:	Investasi Pada Kawasan Pengusahaan
Indikator Kinerja Utama	:	Komitmen Investasi
Deskripsi	:	Komitmen Investasi adalah komitmen untuk meningkatkan penempatan dana pada asset produktif dengan harapan mendapatkan imbal hasil dari pertumbuhan nilai asset tersebut dalam jangka waktu tertentu di wilayah Batam
Formula	:	Telah Memiliki Ijin Usaha.
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam meningkatkan investasi Pada Kawasan Pengusahaan Batam sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Batam.
Satuan Pengukuran	:	US \$
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i> (Akumulasi Januari s.d Desember)
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Semester
Sumber Data	:	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal BP Batam/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

1.2. Realisasi Investasi

Sasaran Strategis	:	Investasi pada kawasan pengusahaan
Indikator Kinerja Utama	:	Realisasi Investasi
Deskripsi	:	Realisasi Investasi adalah jumlah investasi penanaman modal yang masuk di wilayah Batam
Formula	:	Akumulasi Realisasi Investasi (Dari Januari s.d Desember)
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam meningkatkan investasi yang masuk pada Kawasan Pengusahaan Batam sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Batam.
Satuan Pengukuran	:	US \$
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i> (Akumulasi Januari s.d Desember)
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Semester
Sumber Data	:	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal BP Batam/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

1.3 Program Dukungan Kegiatan Investasi

Sasaran Strategis	:	Investasi Pada Kawasan Pengusahaan		
Indikator Kinerja Utama	:	Program Dukungan Kegiatan Investasi		
Deskripsi	:	Program yang mendukung untuk menempatkan dana pada asset produktif dengan harapan mendapatkan imbal hasil dari pertumbuhan nilai asset tersebut dalam jangka waktu tertentu di wilayah Batam		
Formula	:	NO.	KEGIATAN	BOBOT
		1	Pemanfaatan Lahan yang telah habis ijin alokasi 30 tahun, 100 Ha.	20%
		2	Pemanfaatan Lahan terlantar, 10 %	20%
		3	Penyelesaian Perijinan Lahan, 1 Hari Kerja.	20%
		4	Penyelesaian Perijinan Pemasukan Barang, 1 Hari Kerja.	20%
		5	Promosi 6 Jenis Kegiatan	20%
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melakukan kegiatan yang mendukung peningkatkan investasi yang masuk di Batam sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam		
Satuan Pengukuran	:	%		
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d Desember)		
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)		
Periode Pelaporan	:	Semester		
Sumber Data	:	Direktorat Pengelolaan Lahan, Biro Hubungan Masyarakat, Promosi Dan Protokol		

2. Realisasi Jumlah PNB

Sasaran Strategis	:	Kinerja Pendapatan		
Indikator Kinerja Utama	:	Realisasi Jumlah PNB		
Deskripsi	:	Pendapatan dari Pengelolaan Kawasan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN.		
Formula	:	NO.	KEGIATAN	Jumlah
		1	Pendapatan Dari Pengelolaan Kawasan	0.59 T
		2	Pendapatan dari Pengusahaan Lainnya	1.10 T
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk memacu Pemimpin BLU agar meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan dan menggali sumber-sumber pendapatan BLU.		
Satuan Pengukuran	:	Jumlah PNB		
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known		
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)		
Periode Pelaporan	:	Semester		
Sumber Data	:	Laporan Keuangan		

3. Pencapaian Kepuasan Stakeholder Terhadap Pada Pelayanan Publik.

Sasaran Strategis	:	Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Yang Tinggi			
Indikator Kinerja Utama	:	Pencapaian Kepuasan <i>Stakeholder</i> Terhadap Pada Pelayanan Publik			
Deskripsi		Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
Formula	:	Indeks Kuantitatif		Kualitatif	
		Skala 1-4	Skala 1-100	Predikat	Predikat
		3,5324 - 4,0	88,31 – 100,00	Sangat Baik	A
		3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	Baik	B
		2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	Kurang Baik	C
		1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	Tidak Baik	D
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan			
Satuan Pengukuran	:	Indeks			
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d. Desember)			
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Sumber Data	:	Hasil Survei			

4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Sasaran Strategis	: Kinerja Pengelolaan Keuangan BLU yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Modern																											
Indikator Kinerja Utama	: Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU																											
Deskripsi	: Modernisasi pengelolaan BLU adalah upaya penerapan teknologi informasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja BLU, yang antara lain mencakup pemanfaatan BIOS, penggunaan Aplikasi Persuratan, pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan utama BLU, dan penyusunan basis data BLU.																											
Formula	: Modernisasi pengelolaan BLU dihitung dari penyelesaian variable modernisasi pengelolaan BLU (table berikut), dengan tambahan penilaian untuk kelengkapan pengisian data BIOS dan ketepatan waktu penyampaian laporan/data melalui BIOS. Formula: Capaian IKU = Capaian Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU + Capaian Tambahan Variabel penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU sebagai berikut:																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Variabel</th> <th>Nilai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Operasionalisasi Aplikasi BIOS</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Ketersediaan <i>website</i> yang representatif</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Ketersediaan <i>database</i> yang terpusat</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>Ketersediaan <i>dashboard</i> intern dan eksterm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Ketersediaan <i>webservice</i> untuk transfer data ke Kementerian Keuangan</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td>Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem yang Memanfaatkan Teknologi Informasi</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>VII</td> <td>Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> <td>Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi unuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Variabel	Nilai (%)	I	Operasionalisasi Aplikasi BIOS	25	II	Ketersediaan <i>website</i> yang representatif	10	III	Ketersediaan <i>database</i> yang terpusat	15	IV	Ketersediaan <i>dashboard</i> intern dan eksterm	10	V	Ketersediaan <i>webservice</i> untuk transfer data ke Kementerian Keuangan	30	VI	Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	10	VII	Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik	10	VIII	Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi unuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan	15
No.	Variabel	Nilai (%)																										
I	Operasionalisasi Aplikasi BIOS	25																										
II	Ketersediaan <i>website</i> yang representatif	10																										
III	Ketersediaan <i>database</i> yang terpusat	15																										
IV	Ketersediaan <i>dashboard</i> intern dan eksterm	10																										
V	Ketersediaan <i>webservice</i> untuk transfer data ke Kementerian Keuangan	30																										
VI	Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	10																										
VII	Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik	10																										
VIII	Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi unuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan	15																										
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.																											
Satuan Pengukuran	: Persen (%)																											
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known Value</i>																											
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)																											
Periode Pelaporan	: Tahunan																											
Sumber Data	: 1. Data pada BIOS dan data pada sistem informasi BLU; dan 2. Data primer sebagai pembanding/ penguji kevalidan data yang terekam pada sistem.																											

5. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Sasaran Strategis	:	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	
Indikator Kinerja Utama	:	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	
Deskripsi	:	Pembangunan Unit Kerja dalam memperoleh predikat WBK	
Formula	:	Uraian:	Bobot
		Pembangunan Zona Integritas menuju WBK:	100%
		1. Peta Jabatan dan Analisis beban kerja	40%
		2. Penyusunan Perka Gratifikasi	20%
		3. Penetapan Perka Pedoman Agen Perubahan	20%
		4. Pengusulan 2 (dua) Unit Kerja untuk memperoleh predikat WBK	20%
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bebas dari korupsi.	
Satuan Pengukuran	:	%	
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d. Desember)	
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)	
Periode Pelaporan	:	Tahunan	
Sumber Data	:	Pusat Harmonisasi Kebijakan	

6. Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Lingkungan

Sasaran Strategis	:	Inovasi Pelayanan		
Indikator Kinerja Utama	:	Pengembangan Tujuan Wisata Pro Edukasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Lingkungan		
Deskripsi	:	Inovasi Pelayanan adalah kegiatan mewujudkan tujuan wisata yang berpihak pada pendidikan, usaha mikro kecil menengah dan lingkungan di Batam.		
Formula	:	No.	Lokasi Wisata	Jumlah
		1	Taman Rusa - Sekupang.	1
		2	Taman Kolam - Sekupang	1
		3	Agrowisata Sei Temiang.	1
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro yang berwawasan lingkungan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam		
Satuan Pengukuran	:	Jumlah		
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d. Desember)		
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)		
Periode Pelaporan	:	Semester		
Sumber Data	:	Badan Usaha Fasilitas Dan Lingkungan		

